

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia dituntut untuk siap bersaing dengan negara-negara lain. Agar bisa bersaing dengan negara lain, sebelumnya Indonesia harus memantapkan terlebih dahulu perekonomian yang goncang akibat krisis multidimensi yang berkepanjangan. Fundamental perekonomian yang kuat akan meningkatkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi era globalisasi. Pembangunan ekonomi secara nasional tidak bisa terlepas dari pembangunan ekonomi secara regional.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan perkapita penduduk yang diikuti oleh perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan struktur kenaikan produksi dan penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Selain itu pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi (economy growth), dimana keduanya memiliki hubungan saling keterkaitan. Artinya pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar pembangunan ekonomi (Todaro dan Smith, 2004).

Proses pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup

yang lebih bermutu. (Lincoln, 2010) menyatakan bahwa pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan (Dumairy, 1997). Produk-produk industrial memiliki “dasar tukar” (*term of trade*) yang tinggi atau lebih menguntungkan, serta menciptakan nilai tambah yang besar dibanding produk-produk sektor lain. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi melalui proses industrialisasi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan Angkatan kerja yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dan daerah, khususnya pembangunan ekonomi di Sumatera Barat dan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi daerah secara optimal, maka pembangunan daerah dapat disusun menurut tujuan antar sektor. Perencanaan sektoral dimaksudkan untuk pengembangan sektor-sektor tertentu disesuaikan dengan keadaan dan potensi masing-masing sektor dan juga tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Salah satu penggerak pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah sektor industri pengolahan berbasis pertanian.

Oleh karena itu, sektor industri dipersiapkan agar mampu menjadi penggerak dan memimpin (*the leading sector*) terhadap perkembangan sektor perekonomian lainnya (Amin, 2015).

Sektor industri pengolahan meliputi semua kegiatan produksi yang bertujuan meningkatkan mutu barang dan jasa. Proses produksi dapat dilakukan secara mekanis, kimiawi ataupun proses lainnya dengan menggunakan alat-alat sederhana dan mesin mesin. Proses tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan industri, perusahaan pertanian, pertambangan atau perusahaan lainnya (Daryanto, 2010).

Di negara berkembang, sektor industri mampu mengatasi masalah perekonomian. Dimana sektor industri dapat memimpin sektor perekonomian lainnya menuju pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sektor industri mampu menjadi pemimpin terhadap perkembangan sektor perekonomian.

Dalam mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah terdapat beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang kemudian bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah (BPS, 2013).

Seperti yang diketahui bahwasannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang

dihasilkan oleh berbagai unit Produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Untuk itu pemerintah khususnya Sumatera Barat diharapkan terus menerus meningkatkan PDRB-nya khususnya sektor industri yang memiliki prospek potensial untuk dikembangkan (Hasibuan, 2015)

Tabel 1.1 PDRB berdasarkan Sektor Industri di Sumatera Barat tahun 2018-2022 ADHK (Triliun Rupiah)

NO	Sektor industri	2018	2019	2020	2021	2022
1	A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.639,60	37.549,46	37.993,39	38.820,91	40.189,08
2	B Pertambangan dan Penggalian	6.705,05	7.121,86	7.028,91	6.904,55	7.038,28
3	C Industri Pengolahan	16.444,84	16.118,65	16.031,82	16.628,39	16.917,97
4	D Pengadaan Listrik dan Gas	175,08	182,44	170,03	175,37	181,01
5	E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	160,24	170,01	168,25	177,56	185,32
6	F Konstruksi	15.061,09	16.336,31	15.854,14	16.200,24	16.607,63
7	G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25.976,54	27.869,92	27.552,85	28.956,93	30.577,86
8	H Transportasi dan Pergudangan	19.969,55	20.918,71	17.551,68	17.998,21	19.030,28
9	I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.832,88	1.981,56	1.665,50	1.759,79	2.037,91
10	J Informasi dan Komunikasi	11.723,22	12.746,46	13.963,89	14.860,13	15.902,75
11	K Jasa Keuangan dan Asuransi	4.665,42	4.772,02	4.836,00	5.245,00	5.482,90
12	L Real Estat	3.166,85	3.381,41	3.388,83	3.470,47	3.671,09
13	M,N Jasa Perusahaan	722,43	767,25	736,71	745,04	799,64
14	O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	9.175,85	9.814,88	9.757,16	9.840,45	9.927,92
15	P Jasa Pendidikan	6.382,70	6.889,40	7.235,89	7.368,89	7.746,80
16	Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.311,45	2.485,72	2.705,24	2.864,36	2.994,27
17	R,S,T,U Jasa Lainnya	2.883,40	3.099,51	2.786,31	2.984,22	3.338,86
Produk Domestik Regional Bruto		163.996,19	172.205,57	169.426,61	175.000,50	182.629,54

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1.1 dibawah, dapat dilihat bahwa dari 17 sektor ekonomi didalam PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Sektoral) dalam Triliun Rupiah dapat dilihat bahwa sektor industri memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB Sumatera Barat. Pada tahun 2021 sektor industri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan sumbangan sebesar 38,83 triliun rupiah, tertinggi dari 2019. Kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada pada peringkat kedua dengan sumbangan terhadap PDRB Sumatera Barat pada tahun 2022 sebesar 28.96 Triliun Rupiah, dan sektor Transportasi dan Pergudangan berada pada tingkat ketiga dengan sumbangan sebesar 18,00 Triliun Rupiah. selanjutnya untuk diurutkan keempat sektor Industri Pengolahan menyumbang sebesar 16.62 Triliun Rupiah dan yang kelima sektor Konstruksi menyumbang sebesar 16.20 Triliun Rupiah. Dari kelima sektor yang tertinggi tersebut bahwa dapat membuktikan sektor industri termasuk tulang punggung perekonomian Sumatera Barat dan berperan penting bagi perekonomian serta pembangunan Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Tabel Input-Output (I-O) merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Berdsarkan tabel pengganda I-O Sumatera Barat tahun 2007, terdapat Klasifikasi 24 sektor industri:

Tabel 1. 2 Nama dan Kode 24 Sektor Industri

No	Kode	Nama Sektor
1.	32	Industri pemotongan hewan
2.	33	Industri Pengolahan dan Pengawetan Makanan
3.	34	Industri minyak dan lemak
4.	35	Industri beras
5.	36	Industri tepung
6.	37	Industri gula
7.	38	Industri makanan lainnya
8.	39	Industri minuman
9.	40	Industri rokok
10.	41	Industri pemintalan
11.	42	Industri tekstil, pakaian dan kulit
12.	43	Industri bambu, kayu dan rotan
13.	44	Industri kertas, barang dari kertas dan karton
14.	45	Industri pupuk dan pestisida
15.	46	Industri kimia
16.	47	Industri pengilangan minyak
17.	48	Industri barang kerat dan plastic
18.	49	Industri barang-barang dari mineral bukan logam
19.	50	Industri semen
20.	51	Industri dasar besi, baja dan bukan besi
21.	52	Industri barang dari logam
22.	53	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
23.	54	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya
24.	55	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun

Sumber: BPS, 2007

Berdasarkan uraian pendahuluan penelitian diatas, maka akan dan menganalisa **Analisis Keterkaitan Klasifikasi 24 Sektor Industri di Sumatera Barat**. Dengan rumusan masalah,tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Sektor Industri mana yang menjadi prioritas bagi Industri Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah keterkaitan langsung ke depan dan langsung ke belakang sektor industri di Sumatera Barat?
3. Bagaimana Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan di Klasifikasi 24 Sektor Industri di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sektor industri mana yang menjadi prioritas bagi industri di Sumatra Barat.
2. Untuk mengetahui keterkaitan langsung ke depan dan langsung ke belakang sektor industri di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan di Klasifikasi 24 Sektor Industri di Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis sebagai penambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan jawaban atas apa yang ingin diketahui.

2. Bagi akademisi sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dan penambah informasi dalam menyelesaikan penelitiannya.
3. Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai analisis sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat serta dapat menjadi acuan penelitian untuk selanjutnya.
4. Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk keputusan dalam kebijakan yang akan diputuskan.